



Quick Response Analysis

Volume 4, Maret 2020

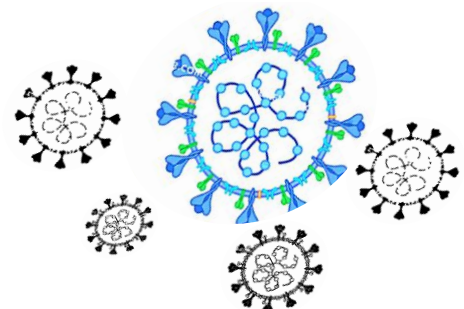
STRATEGI EKONOMI DALAM MENGHADAPI CORONAVIRUS (COVID-19)

LATAR BELAKANG

Saat ini, COVID-19 (Coronavirus) telah mewabah di 47 negara dengan jumlah kasus sebesar 82.294 dan telah menelan korban jiwa sebanyak 2.804 orang. Penyebaran COVID-19 pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, pada tanggal 12 Desember 2019, dengan ditandai adanya indikasi penyakit sejenis pneumonia. Sebelumnya, dua kasus *coronavirus* juga pernah menjadi ancaman kesehatan dunia sejak 2002, yaitu *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus* (SARS-CoV) di tahun 2002 yang mewabah di 37 negara dan *Middle-East Respiratory Syndrome Coronavirus* (MERS-CoV) di tahun 2012 yang mewabah di 27 negara.

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai macam upaya dalam mencegah mewabahnya COVID-19, seperti penyiapan *thermoscanner* di 135 pintu keluar masuk negara, peluncuran Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi *Novel Coronavirus*, pemberlakuan larangan terbang dari dan ke Tiongkok, pembatasan impor hewan hidup dari Tiongkok, serta penjemputan dan karantina WNI dari Provinsi Hubei, Tiongkok. Di samping berbagai upaya tersebut, Pemerintah juga perlu melakukan antisipasi terhadap dampak ekonomi yang mungkin akan ditimbulkan oleh COVID-19.

Untuk menghitung dampak ekonomi dari COVID-19 dapat dikorelasikan dengan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh SARS (disebabkan jenis tipe virus dan asal mula virus dari negara yang sama). Namun, jika melihat perbandingan perkembangan ekonomi Tiongkok saat SARS berlangsung (2002) dengan saat ini, ada kecenderungan bahwa COVID-19 akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar. Hal ini dikarenakan kontribusi ekonomi Tiongkok saat ini yang mencapai lebih dari 16% PDB dunia (saat SARS 4% dari PDB dunia). Selain itu, Tiongkok adalah importir terbesar kedua di dunia dan eksportir dari 40% bahan baku/penolong di Asia. Lebih jauh lagi, jumlah kasus dari COVID-19 yang jauh lebih tinggi dari SARS juga, menimbulkan kekhawatiran yang lebih besar pada pasar.



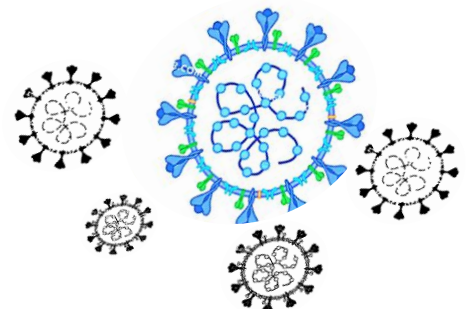
PELEMAHAN EKONOMI TIONGKOK DAN DUNIA

Dalam upaya menekan penyebaran COVID-19, Pemerintah Tiongkok memberlakukan perpanjangan libur Tahun Baru Imlek (dari yang sebelumnya 30 Januari 2020 menjadi 2 Februari 2020). Namun banyak pemerintah lokal yang berlokasi dekat dengan Kota Wuhan (titik pusat dari virus) memperpanjang hari libur dan mengkarantina kota. Upaya tersebut membuat terbatasnya mobilitas barang dan pekerja, yang menyebabkan terganggunya rantai pasok, seperti yang melanda Apple inc. dan Nissan Motor co., yang kesulitan mendapatkan pasokan komponen-komponen krusial.

Pemerintah Tiongkok sebenarnya telah menganjurkan perusahaan untuk memulai kembali aktivitas produksinya sejak tanggal 3 Februari 2020. Namun yang menjadi masalah adalah masih adanya karantina di beberapa wilayah yang membuat mobilitas pekerja masih terbatas. Pekerja migran yang kembali ke tempat kerjanya saat ini baru berjumlah 80 juta orang, dengan perkiraan 120 juta orang akan kembali pada akhir Februari 2020, dan 100 juta sisanya akan kembali setelah Maret 2020.

Dampak COVID-19 disinyalir oleh beberapa tim riset ekonomi akan memberikan tekanan terhadap ekonomi Tiongkok, yakni penurunan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 sebesar 0,2 – 0,8 persen. Estimasi ini umumnya didasari atas asumsi bahwa penyebaran COVID-19 dapat terhenti sebelum April 2020. Sedangkan, untuk dampak terhadap perekonomian dunia, diperkirakan akan terjadi perlambatan sebesar 0,1 persen. Namun yang harus diwaspadai adalah jika COVID-19 dinyatakan sebagai pandemik, karena dapat membawa ekonomi dunia ke situasi yang lebih mengkhawatirkan. Terutama dengan telah terjadinya *recent outbreaks* di Korea Selatan, Italia, dan Iran. Kekhawatiran ini terefleksikan di pasar keuangan dunia, seperti Dow Jones (27.960,80/ (-3,56%), NASDAQ (9.221,28/ (-3,78%), dan S&P 500 (3.225,89/ (-3,35%).

Pelemahan ekonomi ini membawa beberapa dampak bagi Indonesia, yaitu menurunnya nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok yang disebabkan oleh penurunan permintaan dari Tiongkok dan harga komoditas global, menurunnya kunjungan wisatawan mancanegara dari Tiongkok akibat terhentinya akses penerbangan, dan melambatnya industri manufaktur akibat terbatasnya pasokan bahan baku/penolong. Perhitungan sementara Bappenas menunjukkan bahwa potensi perlambatan ekonomi Indonesia adalah sebesar 0,3 – 0,8 persen.



DAMPAK EKONOMI COVID-19 BAGI INDONESIA

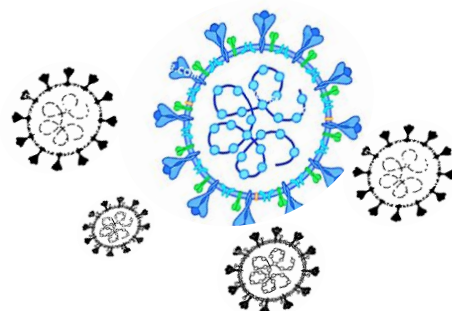
Mayoritas impor Indonesia adalah bahan baku/penolong, sekitar 75% dari total impor dan sebagian besar merupakan komponen yang krusial untuk industri. Berdasarkan data BPS, negara asal impor non-migas terbesar untuk Indonesia adalah Tiongkok, untuk komponen mesin, peralatan mekanis, perlengkapan elektrik, dan sebagainya. Keterbatasan akses terhadap bahan baku/penolong saat ini masih dapat ditangani oleh stok cadangan inventori perusahaan-perusahaan, namun akan mulai mengalami tekanan jika keterbatasan pasokan berlangsung sampai Maret 2020. Hal ini akan menambah tekanan terhadap industri manufaktur yang sebenarnya sudah dirasakan dalam dua tahun terakhir, dimana pertumbuhan industri manufaktur menurun dari sebesar 4,85 persen (2017) menjadi 4,34 persen (2019).

Data ekspor Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa dua komoditas ekspor utama Indonesia adalah bahan bakar mineral (terutama batubara dan LNG), serta CPO dan turunannya (tidak termasuk biodiesel dan oleochemical). Negara tujuan ekspor utama dari kedua kategori komoditas tersebut adalah Tiongkok, dimana total ekspor kedua komoditas tersebut mencapai 11,9 miliar dollar. Dampak COVID-19 sudah mulai dirasakan eksportir Indonesia, berupa realisasi ekspor minyak sawit pada Februari 2020 yang baru mencapai 84 ribu ton (ytd). Angka tersebut masih jauh jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 371 ribu ton (ytd). Penurunan jumlah ekspor ini juga diperparah dengan harga komoditas CPO yang terus menurun dari 3125 MYR/mt pada awal tahun 2020 menjadi 2460 MYR/mt (21 persen) (ytd).

Kekhawatiran yang muncul akibat mewabahnya COVID-19 akan membawa dampak yang signifikan terhadap sektor pariwisata, terutama dengan adanya restriksi perjalanan dari beberapa negara. Penutupan rute penerbangan dari dan ke Tiongkok membuat Indonesia berpotensi kehilangan 1,46 juta wisatawan mancanegara (wisman) atau 1,7 miliar dollar devisa pariwisata selama tahun 2020. Selain wisman dari Tiongkok, dampak penurunan kunjungan wisman juga akan dirasakan dari Jepang dan Singapura (yang memiliki cukup banyak kasus COVID-19 di negaranya). Potensi penurunan wisman juga dapat semakin besar jika COVID-19 ditetapkan sebagai pandemik, mengingat penambahan kasus baru COVID-19 di luar Tiongkok (746 kasus) saat ini sudah lebih tinggi dibandingkan kasus baru di Tiongkok (439 kasus).

PENGUATAN EKONOMI DOMESTIK DAN PELUANG PERBAIKAN PEREKONOMIAN INDONESIA

Dalam kondisi perekonomian global dan sektor perdagangan yang terganggu oleh COVID-19, Pemerintah perlu fokus untuk memperkuat ekonomi domestik. Bank Indonesia telah melakukan langkah yang tepat dengan menurunkan suku bunga acuan (BI *7-Day Reverse Repo Rate*/BI-7DRRR) sebesar 25 basis poin, menjadi 4,75 persen pada 20 Februari 2020. Namun, penurunan tingkat suku bunga acuan ini perlu diiringi dengan kebijakan fiskal ekspansif yang menciptakan permintaan secara langsung, terlebih, Pemerintah masih memiliki ruang fiskal yang luas pada APBN 2020.



Strategi jangka pendek dalam rangka penguatan ekonomi domestik, sebagai berikut:

- a. **Pemerintah perlu segera merealisasikan belanja yang berbentuk *cash transfer***, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan dana desa. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan konsumsi dan menjaga daya beli rumah tangga, dengan tetap memperhatikan pasokan dan stabilisasi harga kebutuhan pokok. Selain itu, program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga perlu ditingkatkan, baik itu dengan memperluas penerima ataupun dengan menaikkan plafon dan kredit tanpa agunan.
- b. **Perlunya insentif fiskal terhadap sektor pariwisata** berupa subsidi tiket pesawat, terutama bagi destinasi wisata yang terdampak signifikan dari penurunan jumlah wisman, seperti Bali, Manado, Labuan Bajo, Bintan, dan Jogja. Promosi wisata juga tetap dilakukan dengan pesan bahwa Indonesia aman dari COVID-19, terutama ke negara tetangga seperti Australia. Selain itu, Pemerintah dan BUMN juga dianjurkan untuk mulai menggelar kegiatan MICE (*meeting, incentive, convention, and exhibition*) di daerah tersebut.
- c. **Belanja infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah sebisa mungkin agar dilaksanakan dengan padat karya**, agar *beneficiaries* langsung dari kegiatan tersebut dapat meningkat.

Strategi jangka panjang dalam rangka perbaikan perekonomian Indonesia, antara lain:

- a. **Pemerintah perlu meningkatkan hubungan kerja sama di sektor perdagangan dan pariwisata** dengan negara-negara non-tradisional, seperti negara Timur Tengah, Eropa Timur, Amerika Latin, dan sebagainya.
- b. Untuk meningkatkan ketahanan terhadap guncangan global, **Pemerintah perlu memperkuat rantai pasok domestik (*backward and forward linkages*)**, terutama dengan memberikan insentif fiskal dan non-fiskal yang tepat, untuk meningkatkan industri substitusi impor dan kandungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Data dari JETRO memperlihatkan bahwa pertumbuhan TKDN di perusahaan-perusahaan Indonesia relatif stagnan jika dibandingkan negara tetangga, seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina.
- c. Untuk membantu sektor kelapa sawit yang terdampak cukup signifikan dari COVID-19, terlebih dengan sebelumnya telah ada tekanan dari restriksi ekspor kelapa sawit ke EU, **Pemerintah perlu mempercepat perluasan kebijakan penerapan biodiesel dan terutama *green diesel***, berikut dengan pemberian insentif bagi industrinya. Hal ini juga sejalan dengan komitmen dalam RPJMN 2020-2024 untuk menurunkan tingkat emisi CO₂ sebesar 27,3 persen di tahun 2024.

Penulis: Dwiputra Ahmad Ramdani
Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja
Kementerian PPN/Bappenas

Email: dwiputra.ramdani@support.bappenas.go.id

